

HAKIM

Hendri Kampai: Standar Informasi Publik Benar, Akurat, dan Tidak Menyesatkan

Updates. - HAKIM.OR.ID

Sep 26, 2024 - 16:46

The logo for 'Right to Know Day' features the word 'Right' in a large, blue, sans-serif font. Below it, 'to Know' is written in a smaller, dark grey, sans-serif font. To the right of 'Know' is a blue speech bubble containing the word 'Day' in white. The entire logo is set against a light blue gradient background.

Right
to Know Day

28 September

PENDIDIKQN - Penyampaian informasi publik merupakan tanggung jawab penting, terutama bagi lembaga pemerintah dan organisasi yang berkaitan dengan publik. Informasi yang diberikan harus memenuhi standar tertentu agar tidak menyebabkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan informasi oleh publik. Tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam standar informasi publik adalah keabsahan informasi (benar), ketepatan informasi (akurat), dan kejelasan

informasi (tidak menyesatkan).

1. Benar (Keabsahan Informasi)

Keabsahan informasi berarti bahwa informasi yang disampaikan kepada publik harus memiliki dasar hukum, fakta, dan bukti yang dapat dipercaya. Ini berarti setiap informasi yang dirilis oleh lembaga pemerintah, organisasi, atau media harus berlandaskan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan informasi mencakup beberapa aspek berikut:

Berdasarkan Fakta dan Data yang Valid: Informasi harus berasal dari sumber yang kredibel dan terverifikasi. Data statistik, laporan penelitian, atau dokumentasi resmi dari instansi pemerintah menjadi sumber yang dapat menjamin keabsahan informasi. Misalnya, pengumuman tentang jumlah penduduk harus bersumber dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan bukan dari informasi yang tidak jelas asal-usulnya.

Memiliki Landasan Hukum: Informasi yang sah biasanya didukung oleh peraturan, undang-undang, atau ketentuan yang berlaku. Contohnya, informasi terkait kebijakan publik, peraturan daerah, atau keputusan pemerintah harus merujuk pada regulasi atau undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini penting agar publik dapat memahami dasar hukum yang menjadi landasan informasi tersebut.

Menghindari Informasi Palsu (Hoaks): Untuk memastikan keabsahan, informasi harus bebas dari manipulasi, hoaks, atau distorsi fakta. Penyebaran informasi palsu dapat merusak kepercayaan publik dan menyebabkan kebingungan. Oleh karena itu, informasi harus melalui proses verifikasi dan cross-check sebelum dirilis kepada publik.

Didukung oleh Bukti dan Saksi: Keabsahan juga dapat dipastikan dengan adanya bukti atau saksi yang mendukung informasi tersebut. Misalnya, dalam laporan investigasi atau kasus hukum, informasi yang benar biasanya didukung oleh dokumen, rekaman, atau pernyataan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan informasi merupakan fondasi utama dalam penyampaian informasi publik. Ketika informasi disampaikan dengan benar, lembaga penyedia informasi dapat membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata publik. Hal ini juga membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang mereka terima.

2. Akurat (Ketepatan Informasi)

Ketepatan informasi atau akurasi adalah salah satu standar penting dalam penyampaian informasi publik. Informasi yang akurat harus berdasarkan data yang tepat, lengkap, dan sesuai dengan fakta yang ada. Informasi yang akurat juga berarti bebas dari kesalahan, baik secara fakta, angka, konteks, maupun interpretasi. Berikut adalah beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam memastikan ketepatan informasi:

Data yang Terbaru dan Terverifikasi: Informasi harus didasarkan pada data

terkini yang telah diverifikasi. Penggunaan data yang usang atau tidak terupdate dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam menyajikan data kependudukan atau ekonomi, lembaga yang menyediakan informasi harus merujuk pada laporan terbaru dari sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau kementerian terkait.

Detail yang Spesifik dan Tepat: Informasi yang akurat harus mencakup detail yang tepat tanpa ada yang lebih-lebihkan atau dikurangi. Informasi tersebut harus menjelaskan dengan spesifik subjek atau peristiwa yang sedang dibahas. Misalnya, saat menyampaikan data tentang angka kemiskinan, harus jelas mencakup aspek seperti wilayah, periode waktu, dan metode penghitungan yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman.

Konsistensi dalam Penyampaian: Akurasi informasi juga berarti bahwa informasi yang disampaikan harus konsisten. Angka, istilah, dan fakta yang digunakan harus sama dan tidak berubah antara satu sumber dengan sumber lainnya yang dikeluarkan oleh institusi yang sama. Misalnya, jika sebuah instansi menyatakan angka inflasi sebesar 4% pada bulan tertentu, angka tersebut harus konsisten dalam semua laporan dan publikasi resmi mereka.

Penggunaan Metodologi yang Jelas: Informasi akurat sering kali bergantung pada metodologi yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Lembaga penyedia informasi harus menjelaskan metode apa yang digunakan, apakah survei, sensus, atau penelitian ilmiah, sehingga publik memahami bagaimana data tersebut dihasilkan. Misalnya, saat merilis hasil survei, penting untuk mencantumkan ukuran sampel, margin of error, dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Mencegah Penyesatan Makna: Informasi akurat harus disampaikan secara objektif tanpa menambah atau mengurangi konteks yang dapat mengubah makna sebenarnya. Penggunaan kata, angka, atau grafik harus tepat dan tidak menyesatkan pembaca. Misalnya, grafik pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan skala dan rentang waktu yang sebenarnya agar publik tidak salah memahami situasi ekonomi yang digambarkan.

Ketepatan informasi sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sumber informasi. Ketika informasi akurat, publik dapat membuat penilaian dan keputusan yang tepat berdasarkan fakta, tanpa terpengaruh oleh informasi yang salah atau bias.

3. Tidak Menyesatkan (Kejelasan Informasi)

Informasi yang tidak menyesatkan adalah informasi yang disampaikan dengan cara yang jelas, jujur, dan transparan sehingga mudah dipahami oleh publik tanpa menimbulkan salah tafsir. Kejelasan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak mengarahkan pada pemahaman yang salah atau menciptakan kebingungan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam memastikan informasi tidak menyesatkan:

Bahasa yang Sederhana dan Jelas: Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh target audiens, tanpa menggunakan istilah teknis yang terlalu rumit. Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas sangat

penting, terutama ketika menyampaikan informasi yang kompleks kepada masyarakat umum. Misalnya, informasi mengenai kebijakan kesehatan atau bantuan sosial harus dijelaskan dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

Konteks yang Lengkap: Informasi yang tidak menyesatkan harus mencakup konteks yang lengkap dan relevan sehingga publik dapat memahami situasi secara menyeluruh. Menghilangkan atau mengurangi konteks penting dapat menyebabkan kesalahan interpretasi. Misalnya, ketika melaporkan tingkat pengangguran, informasi tersebut harus mencakup periode waktu, metode perhitungan, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi angka tersebut.

Objektif dan Tidak Bias: Informasi harus disampaikan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Informasi yang menyesatkan sering kali disebabkan oleh bias atau kecenderungan untuk mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, sumber informasi harus menyajikan data dan fakta sebagaimana adanya tanpa memberikan interpretasi yang memihak. Misalnya, saat menyampaikan berita tentang proyek pemerintah, laporan harus mencantumkan manfaat dan tantangan tanpa berusaha mempengaruhi pendapat publik dengan cara yang tidak adil.

Tidak Memanipulasi Data atau Grafik: Penyajian data dan grafik harus dilakukan dengan jujur dan transparan. Manipulasi grafik, seperti mengubah skala atau hanya menampilkan sebagian data, dapat menyebabkan kesalahpahaman. Grafik dan tabel harus menyajikan data dengan proporsi yang tepat sehingga pembaca dapat memahami situasi dengan akurat.

Penjelasan yang Detail: Informasi yang disajikan harus memiliki penjelasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan publik dan menghindari ambiguitas. Misalnya, dalam laporan mengenai kebijakan publik, harus dijelaskan bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan, siapa yang akan terdampak, dan apa saja manfaat serta risiko yang mungkin terjadi.

Menghindari Sensasionalisme: Dalam penyampaian informasi, terutama melalui media massa, penting untuk menghindari penggunaan judul atau frasa yang sensasional dan tidak mencerminkan isi sebenarnya dari informasi tersebut. Sensasionalisme dapat menyesatkan publik dan menciptakan persepsi yang salah. Informasi harus disampaikan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Kejelasan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan antara lembaga penyedia informasi dan masyarakat. Informasi yang disampaikan dengan cara yang jelas, lengkap, dan jujur akan membantu publik memahami situasi dengan lebih baik, membuat keputusan yang tepat, dan menghindari kesalahpahaman atau konflik akibat informasi yang menyesatkan.

Informasi yang tidak menyesatkan berarti informasi tersebut harus disampaikan dengan jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak menyebabkan penafsiran yang salah di kalangan publik. Penyajian informasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tanpa menggunakan istilah yang terlalu teknis atau rumit bagi masyarakat awam. Selain itu, informasi tidak boleh disajikan secara parsial atau dipotong-potong yang dapat menimbulkan kesan yang salah. Transparansi dan konteks penuh dari informasi yang disampaikan menjadi kunci untuk memastikan

bahwa publik dapat memahami informasi secara tepat.

Implementasi Standar

Untuk menerapkan standar ini, perlu ada regulasi dan pedoman yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Lembaga dan organisasi yang menyediakan informasi harus memiliki kebijakan internal yang memastikan setiap informasi yang dirilis sudah melalui proses verifikasi, penyuntingan, dan uji keakuratan. Selain itu, pelatihan bagi petugas atau pejabat yang bertugas dalam pengelolaan informasi publik juga penting untuk menjaga kualitas dan integritas informasi.

Kesimpulan

Standar informasi publik yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan menjadi landasan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyedia informasi. Keberhasilan dalam menyampaikan informasi yang memenuhi standar tersebut tidak hanya membantu publik dalam mengambil keputusan, tetapi juga menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan transparan. (Hendri Kampai)